

Konstitusi Rancangan Rusia untuk Suriah: Pertimbangan tentang Pemerintahan di Kawasan Tersebut

Leif STENBERG

Direktur, AKU-ISMC

Dalam makalah berikut ini, saya akan mengambil perspektif yang sebagiannya dibangun dari profesi saya dan sebagian lagi dari pengalaman kerja lapangan saya di Suriah. Saya adalah seorang Profesor bidang Studi Islam dan penelitian saya di Suriah telah berfokus pada satu gerakan keagamaan di Damaskus. Untuk memahami dan menganalisis gerakan ini, saya telah mengadopsi sebuah perspektif yang saya anggap sangat penting untuk memahami agama dan gerakan keagamaan, sebagai bagian dari masyarakat dan tidak terpisah darinya. Salah satu tujuannya adalah memikirkan peran dan fungsi agama dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menjelaskan beberapa pengalaman baru-baru ini dan untuk menghubungkan perspektif ini dengan pemerintahan dan rancangan undang-undang untuk konstitusi Suriah, saya mulai dengan dua kutipan dari wawancara dengan para pemimpin agama Suriah yang dilakukan di Beirut pada awal bulan Januari 2017.

Untuk beberapa saat, saya telah melakukan wawancara dengan para pemimpin agama Suriah di Beirut. Mereka melakukan perjalanan dari Damaskus dan kami bertemu di sebuah hotel di pusat kota Beirut. Beberapa dari antara mereka telah saya kenal selama hampir 20 tahun. Kami biasa memulai pertemuan dengan membahas tentang perkembangan terakhir di Damaskus dan Suriah pada umumnya. Salah satu rekan saya adalah seorang pria yang lebih tua, kelahiran tahun 1930-an, yang saat ini mendekati usia 80 tahun. Dia menyatakan bahwa dalam percakapan dengan teman-temannya, banyak dari antara mereka secara psikologis merasa lelah dan nyaris menahan diri dari berkomentar tentang situasi pribadi atau perang di negara mereka. Selain itu, teman saya menyatakan bahwa percakapan sering berakhir dengan perkataan seperti *alhamdulillah*, dalam konteks ini merupakan komentar yang mencerminkan pandangan berantakan mereka tentang kehidupan pada umumnya, serta pandangan bahwa hanya Tuhan abstrak yang dapat mengetahui apa yang akan terjadi terhadap Suriah.

Seorang pemimpin agama lain yang berpartisipasi dalam pertemuan di Beirut menyatakan bahwa sebelum bulan Maret 2011 ia adalah pendukung partai-partai yang dibangun atas nilai-nilai agama dan bahwa ia telah melihat komposisi sebuah partai yang mewakili Islam sejati sebagai kunci untuk membuat Suriah menjadi negara yang makmur. Idennya adalah bahwa interpretasi Islam sejati yang dibentuk melalui sebuah partai politik akan menciptakan pedoman etika untuk membangun masyarakat yang sukses. Namun, pada bulan Januari 2017 dia benar-benar berubah pikiran. Karena pengalamannya dalam perang, dia sekarang menganggap bahwa agama dalam bentuk apa pun harus berada sejauh mungkin dari politik, dan bahwa gagasan awalnya tentang sebuah partai Islam belum matang.

Dalam pikiran saya, kedua cerita ini adalah contoh pandangan yang tidak selalu didengar yang menunjuk pada dua kesulitan dalam kaitannya dengan penciptaan sebuah konstitusi baru di Suriah. Kisah pertama mewakili sikap yang hampir tertekan terhadap perang di Suriah - perasaan putus asa yang mendalam dan meningkat setiap hari krisisnya berlanjut - keputusan yang terkait dengan perasaan negara dan orang Suriah sebagai ditinggalkan dan/atau ditelantarkan. Jika ini adalah representasi dari suasana umum orang Suriah, sulit untuk melihat sejauh mana saran tentang sebuah konstitusi baru dari aktor asing mana pun akan diterima secara positif. Oleh karena itu, satu hal yang ingin saya tekankan adalah bahwa jika, seperti yang dinyatakan dalam rancangan undang-undang dasar, konstitusi ini akan diterapkan oleh referendum nasional, sehingga orang-orang Suriah harus dilibatkan dalam penyusunannya. Ini adalah urutan untuk melabuhkan Konstitusi baru di antara orang Suriah, tanpa memandang apakah mereka berada dalam negara Suriah atau tidak. Selain itu, penting untuk mendapatkan kepercayaan dalam proses politik di antara penduduk Suriah. Referendum tentang konstitusi tidak akan bernilai penting sama sekali jika alasan mengapa hal itu terjadi tidak dipahami oleh sebagian besar penduduknya. Pengalaman pemilihan bebas dan adil di Suriah bersifat terbatas.

Kisah kedua mungkin mengungkapkan posisi yang diambil oleh para pemimpin agama yang tidak terkait dengan rezim Suriah atau gerakan Islam seperti negara Islam, Jabahat Fatah al-Sham (mantan Jabal al-Nusra), dan Ahrar al-Sham. Saya mengacu pada pemimpin agama yang merupakan tokoh terkemuka di masyarakat Suriah sebelum bulan Maret 2011 di desa, lingkungan perkotaan, dan media. Para pemimpin agama yang telah melakukan tindakan pengimbangan antara rakyat dan rezim.

Dalam kasus Sunni, para pemimpin ini sering dikaitkan dengan jaringan Sufi global dan lokal, untuk kepentingan ekonomi dan ambisi politik. Meski demikian, karakter sekuler dari rancangan konstitusi Rusia mungkin terlebih dulu dapat dianggap sebagai meruntuhkan peran agama dan pemimpin agama di masyarakat. Namun, pada saat bersamaan jika ada para pemimpin agama yang telah memilih pemisahan antara agama dan politik, mereka mungkin menganggap bentuk tulisan ini bekerja menguntungkan mereka. Juga harus dicatat bahwa rancangan konstitusinya tidak menyebutkan hukum Islam sebagai sumber utama dari undang-undang seperti halnya konstitusi Suriah tahun 2012. Untuk menghapuskan hukum Islam dari kerangka hukum Suriah mungkin merupakan tugas yang sulit, namun saya tidak yakin bahwa semua pemimpin agama akan menentanginya. Rekan saya yang disebutkan di atas mungkin akan menyatakan bahwa dalam konteks kontemporer akan lebih bermanfaat untuk memikirkan hukum Islam sebagai penyedia panduan etika bagi Muslim modern dalam kehidupan sehari-hari, dan bukan sebagai sumber tegas untuk sistem hukum.

Kedua cerita tersebut mewakili suara orang Suriah di luar rezim dan gerakan Islam, serta suara banyak orang yang tidak lagi berada di Suriah. Diantaranya, kelelahan yang ada mengenai peran agama dalam perang Suriah. Juga terdapat perasaan putus asa mengenai apa yang dianggap sebagai dukungan yang tidak ada untuk negara dan orang Suriah dalam konflik tersebut. Di antara para pemimpin agama yang tidak berada di pihak gerakan Islam atau milisi Kristen dalam hal itu, atau tidak tunduk pada rezim tersebut, teks rancangan undang-undang tersebut dapat mewakili kesempatan untuk struktur baru, terutama jika rancangan undang-undang tersebut juga menyiratkan penghapusan Kementerian Agama (*Awqaf*).

Di Suriah sebelum bulan Maret 2011, warga negara dan orang yang tinggal di Suriah tanpa hak kewarganegaraan penuh, seperti orang Palestina, tidak sama memiliki hak yang di bawah hukum, di pasar kerja, atau di masyarakat pada umumnya. Para ilmuwan di Suriah telah menunjukkan bagaimana rezim saat ini bernegosiasi dengan berbagai kelompok etnis atau agama, terutama kelompok-kelompok minoritas. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kelompok warga loyal yang mungkin mendapatkan keuntungan karena dukungan mereka terhadap negara. Oleh karena itu, tergantung pada etnisitas atau kepemilikan agama, Anda

dievaluasi sebagai warga negara dan pada tingkat kelompok Anda tunduk pada negosiasi, yang hasilnya memberikan status tertentu kepada komunitas Anda.

Meskipun mungkin merupakan praktik yang diwariskan dari zaman Ottoman, kemungkinan yang berbeda untuk karier di dalam negara bagi orang Kurdi, Palestina, Alawis, Sunni, dan Syiah dibangun atas kepemilikan etnik atau agama. Penetapan untuk sebagian besar jabatan, terutama yang lebih tinggi, dalam administrasi negara selalu memiliki komponen etno-religius. Praktik penetapan ini tidak sesuai dengan teks rancangan undang-undang tentang hak individu dan peran pegawai negeri sipil, namun pada saat bersamaan ini adalah praktik yang telah menjadi ciri masyarakat Suriah sejak lama.

Selain itu, perlu dicatat dalam konteks ini bahwa pertanyaan mayoritas dan minoritas di Suriah adalah masalah keamanan. Pertanyaan tentang mayoritas dan minoritas juga menjadi perhatian dalam situasi ketika pertanyaan tersebut tidak hanya menyangkut kekuasaan politik, tapi juga tentang akses terhadap kekuasaan dan, misalnya pasar tenaga kerja. Secara umum, kebijakan rezim adalah untuk menciptakan keadaan ketidakpercayaan di antara berbagai kelompok masyarakat Suriah dan bernegosiasi dengan ini untuk memastikan bahwa mereka – negara - menjadi satu-satunya penyedia keselamatan serta peluang. Khususnya, demonstrasi pada bulan Maret 2011 diarahkan pada penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara, ketidakmampuan pegawai negeri, dan korupsi yang tersebar luas. Dua slogan yang paling menonjol dalam demonstrasi tahun 2011 dan 2012 adalah hak atas martabat dan hak atas kebebasan. Dalam konteks ini, masalahnya adalah rezimnya - negara Suriah yang otoriter – yang merupakan alasan terjadinya pemberontakan di tahun 2011 – keadaan yang terutama terkait dengan masalah keamanan, dan tidak dengan mengembangkan institusi negara fungsional.

Suriah bisa dibayangkan – dalam hal poin yang telah saya sebutkan di atas – sebagai contoh keadaan yang mengembangkan kebijakan ketidakpercayaan. Yang terkait dengan ini adalah celah dalam kontrak sosial – istilah "kontrak sosial" di sini dipahami secara sederhana sebagai kesepakatan yang memberi legitimasi terhadap peran negara dan individu di masyarakat. Saya menganggap bahwa di mata kebanyakan orang Suriah, negara Suriah yang otoriter dan hirarkis beserta lembaganya kekurangan kepercayaan, terutama mengenai pemenuhan sejumlah hak yang tertulis dalam konstitusi saat ini dan juga dalam rancangan

konstitusi. Ada defisit klasik dalam hal kepercayaan, warga tidak percaya bahwa negara akan memenuhi tanggung jawabnya. Jika gagasan yang disebutkan sebelumnya benar, yaitu bahwa Suriah adalah contoh negara yang telah menciptakan dan memantau ketidakpercayaan di antara berbagai kelompok orang Suriah, maka ini terkait dengan defisit keyakinan tentang kapasitas institusi negara. Jika asumsi ini benar, kontrak sosial yang retak memiliki dimensi hierarkis sekaligus horizontal. Sehubungan dengan rancangan undang-undang tersebut, menurut pendapat saya, terdapat celah besar antara deskripsi kontrak sosial dalam rancangan undang-undang dasarnya dan kenyataan kehidupan sehari-hari orang Suriah sebelum bulan Maret 2011, belum lagi situasinya setelah bulan Maret 2011. Namun, dukungan bagi gagasan agar lebih banyak orang Suriah terlibat dalam pembuatan rancangan konstitusi juga dapat menjadi bagian dari proses penyembuhan masyarakat Suriah.

Perang yang sedang berlangsung telah mengubah peta demografis, hubungan sosial, kehidupan politik, realitas ekonomi, dan lanskap keagamaan di Suriah. Namun, saat kedamaian akhirnya tiba, kekosongan yang akan tercipta terkait peran agama, komunitas agama, dan pemuka agama tidaklah jelas. Pastinya, ruang ini bisa diisi dengan pemahaman baru tentang agama dan/atau Islam.

Suriah tidak akan pernah sama lagi, tapi untuk berspekulasi tentang hasilnya sulit. Namun, ada dua hal yang saling terkait mengenai banyak pertanyaan yang perlu ditangani mengenai kaum muda di Suriah. Pertama-tama, 50% populasi Suriah sebelum bulan Maret 2011 berusia 25 tahun ke bawah. Pada tahun 2017, peran kaum muda jarang, jika pernah, diangkat dalam diskusi tentang Suriah saat ini. Namun, suara kaum muda perlu menjadi bagian dari negosiasi, juga rekonstruksi negara setelah perdamaian tercapai. Kedua, jika anggapan ini benar bahwa kaum muda Suriah berpaling dari agama dan melakukan praktik keagamaan karena mereka menganggap "agama", dalam konsep konseptualisasi apa pun, adalah alasan konflik, maka konstitusi yang didefinisikan dengan baik yang dikembangkan dari perspektif sekuler dapat menerima dukungan yang cukup besar. Mungkin tantangan utama dalam hal ini adalah mengatur partisipasi kaum muda Suriah dalam penyusunan konstitusi dan proses perdamaian pada umumnya.

Akhirnya, dari perspektif yang lebih luas, diskusi di Suriah menyerupai diskusi tentang konstitusi di banyak negara Afrika dan Asia, serta Timur Tengah yang lebih luas.

Referendum terbaru Suriah tentang konstitusi adalah pada tahun 2012 dan Mesir telah memiliki sekitar 10 referendum mengenai isi konstitusi mereka sejak tahun 1971. Sebagai tambahan, perwakilan LSM telah, misalnya, dalam banyak kesempatan menyatakan harapan mereka bahwa sebuah undang-undang baru akan menjadi alat untuk menempatkan negara masing-masing kembali ke jalur semula. Harapan mereka adalah bahwa konstitusi sebagai dokumen dapat menyembuhkan frustrasi sosial, menyelesaikan hubungan gender, dan menutup kesenjangan antara pemerintah dan warga negara serta dengan demikian membangun kontrak sosial yang sehat antara warga negara dan negara. Saya tidak melihat alasan untuk optimis mengenai isu-isu yang dibahas di atas pada saat ini. Namun, satu hal yang jelas dari konflik Suriah sejak bulan Maret 2011 adalah bahwa hal itu telah berubah dan secara tak terduga telah mengambil jalan yang tidak diantisipasi, dan hal itu akan dilakukan lagi.